



# **MANAJEMEN RISIKO PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TAHUN 2024**

**Jl. Jenderal Sudirman No. 226 Arga Makmur  
Telp. (0737) 521014 Fax. (0737) 521004  
Email : [pnarma@ymail.com](mailto:pnarma@ymail.com)  
Website : [www.pn-argamakmur.go.id](http://www.pn-argamakmur.go.id)**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Umum

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu:

- 1) *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
- 2) *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)
- 3) *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)
- 4) *Information & Communication* (Informasi dan Komunikasi)
- 5) *Monitoring* (Pemantauan)

Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai Satuan Kerja yang bernaung dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk menerapkan unsur-unsur dalam SPIP untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”.

### 2. Maksud dan Tujuan

Penerapan Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Arga Makmur guna tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penerapan manajemen risiko pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II bertujuan untuk :

- a) meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan

- peningkatan kinerja;
- b) mendorong manajemen yang proaktif;
- c) memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d) meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e) meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan hukum yang berlaku;
- f) meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan; dan
- g) meningkatkan ketahanan organisasi.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan manajemen risiko pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II meliputi kegiatan utama sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja yang meliputi :

- a) Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2023 dan Perkara Masuk Tahun 2024 secara tepat waktu
- b) Penyelesaian perkara dengan memberikan Putusan yang berkualitas kepada Pencari Keadilan
- c) Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melalui Diversi
- d) Pelayanan yang Prima bagi Pengguna Layanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur
- e) Penyampaian/Pemberitahuan Putusan kepada Para Pihak Yang Bersengketa
- f) Pelaksanaan Mediasi
- g) Pengajuan/Pengiriman Berkas Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu
- h) Penyelesaian perkara Prodeo
- i) Pelaksanaan persidangan di luar Gedung Pengadilan
- j) Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum

k) Pelaksanaan Eksekusi

#### 4. Dasar Hukum

Penerapan Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Arga Makmur dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

475/SEK/SK/VII/2019, Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

### B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

#### 1. Penetapan Konteks

Penetapan Konteks dilakukan meliputi penentuan Unit Pemilik Risiko, Sasaran Yang Akan Dikelola Risikonya, Horizon Waktu Risiko yang akan dikelola, dan penetapan kriteria untuk Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko. Unit Pemilik Risiko adalah Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II. Adapun sasaran yang dikelola risikonya sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 meliputi:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Horizon Waktu Risiko yang akan dikelola adalah tahunan atau sesuai tahun anggaran.

Kriteria yang dipakai dalam melakukan Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Frekuensi/Kemungkinan Terjadinya Risiko  
Frequency/Probability):

<b>DESKRIPSI</b>	<b>KEMUNGKINAN</b>	<b>SKALA KEMUNGKINAN</b>	<b>DEFINISI</b>
HAMPIR PASTI TERJADI	91%-99%	5	Jika kemungkinan terjadinya suatu risiko antara 91% sampai dengan 99%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan hampir pasti akan terjadi.
KEMUNGKIN AN BESAR TERJADI	51%-90%	4	Jika kemungkinan terjadinya suatu risiko antara 51% sampai dengan 90%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan besar akan terjadi.
MUNGKIN TERJADI	31%-50%	3	Jika kemungkinan terjadinya suatu risiko antara 31% sampai dengan 50%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan Mungkin akan terjadi.
KEMUNGKIN AN KECIL	11%-30%	2	Jika kemungkinan terjadinya suatu

<b>DESKRIPSI</b>	<b>KEMUNGKINAN</b>	<b>SKALA KEMUNGKINAN</b>	<b>DEFINISI</b>
TERJADI			risiko antara 11% sampai dengan 30%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan Kemungkinan kecil akan terjadi.
KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI	1%-10%	1	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 1% sampai dengan 10%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan Kemungkinan tidak akan terjadi.

b. Tingkat Dampak Risiko (Impact / Consequences):

<b>Tingkat</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>Penurunan Reputasi dan/atau kepercayaan Stakeholder</b>	<b>Penurunan Kinerja</b>	<b>Gangguan terhadap Layanan Tusi Organisasi</b>
1	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
3	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
4	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

5	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Indikator Keuangan Negara:

1. Sangat Tinggi : Lebih dari Rp 10.000.000,00
2. Tinggi : Rp 1.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,00
3. Sedang : Maksimal Rp 1.000.000,00
4. Rendah : -
5. Sangat Rendah : -

Indikator Penurunan Reputasi dan/atau Kepercayaan

Stakeholder:

1. Sangat Tinggi : Jika berdampak kepada Negara dan Pemerintah
2. Tinggi : Jika berdampak kepada Mahkamah Agung
3. Sedang : Jika berdampak kepada Satker
4. Rendah : Jika berdampak kepada Bagian/ Subbagian
5. Sangat Rendah: Jika berdampak kepada individu yang bersangkutan

Indikator Penurunan Kinerja berdasarkan SOP (waktu) :

1. Sangat Rendah : maksimal terlambat sehari dari SOP
2. Rendah : terlambat 2 - 3 hari dari SOP
3. Sedang : terlambat 4 - 5 hari dari SOP
4. Tinggi : terlambat 6 - 10 hari dari SOP
5. Sangat Tinggi : terlambat diatas 10 hari dari SOP

Indikator Gangguan terhadap Layanan Tusi Organisasi

(berfungsi atau tidak berfungsi):

1. Sangat Rendah : Layanan terganggu maksimal 1 jam
2. Rendah : Layanan terganggu maksimal 1 - 2,5 jam
3. Sedang : Layanan terganggu maksimal 2,5 - 5 jam
4. Tinggi : Layanan terganggu maksimal 5 - 7,5 jam
5. Sangat Tinggi : Layanan terganggu lebih dari 1 hari kerja

c. Tabel Analisis Risiko:

Matriks Analisis Risiko 5x5			DAMPAK				
DESKRIPSI	KEMUNGKINAN	SKALA KEMUNG KINAN	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
			1	2	3	4	5
HAMPIR PASTI TERJADI	91-99%	5	5	10	15	20	25
KEMUNGKINAN BESAR TERJADI	51%-90%	4	4	8	12	16	20
MUNGKIN TERJADI	31%-50%	3	3	6	9	12	15
KEMUNGKINAN KECIL TERJADI	11%-30%	2	2	4	6	8	10
KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI	1%-10%	1	1	2	3	4	5

d. Tabel Status Risiko :

DESKRIPSI	LEVEL	RANGE NILAI
EKSTRIM/SANGAT TINGGI	5	15 s/d 25
TINGGI	4	10 s/d 12
MODERAT	3	5 s/d 9
SEDANG	2	3 s/d 4
RENDAH	1	1 s/d 2

Keterangan : Risiko yang memiliki skala dampak 5 otomatis masuk kategori ekstrim. Moderat ke atas perlu segera dimitigasi.

2. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan-kemungkinan atau kejadian-



kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama.

Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, Rencana Strategis 2020-2024, dan SOP. Sedangkan Metode Identifikasi Risiko yang digunakan adalah Analisis Proses Bisnis Organisasi, Analisis SWOT, Wawancara, dan Brainstorming. Hasil Identifikasi Risiko dituangkan dalam Formulir Register Risiko Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Lampiran 1 laporan ini.

### 3. Analisis Risiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan/ frekuensi suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah dilakukan, dan diakhiri dengan menentukan tingkat risiko.

Data yang digunakan dalam tahap ini adalah Tabel Kriteria Kemungkinan/Frekuensi, Tabel Kriteria Dampak, dan Tabel Analisis Risiko.

### 4. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan dengan cara membandingkan tingkat risiko yang diestimasi pada tahap Analisis Risiko dengan Kriteria Tingkat Risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Risiko menghasilkan daftar risiko yang diranking berdasarkan tingkat Risiko (hasil Perkalian tingkat kemungkinan/frekuensi dengan tingkat dampak). Tahap ini dimaksudkan untuk menyediakan daftar skala prioritas risiko dari yang paling memerlukan penanganan sampai dengan yang paling tidak memerlukan penanganan sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menangani risiko.

### 5. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko dilakukan dengan langkah-langkah

pengendalian yang disusun secara sistematis dengan tujuan menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko yang kemungkinan terjadi. Hal ini dilaksanakan melalui pembangunan lingkungan pengendalian sebagai upaya pengendalian awal yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak risiko sehingga meminimalkan perlunya tindakan pengendalian lanjutan. Pembagian risiko dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan layanan Posbakum, yaitu melalui kerjasama dengan LBH atau Advokat dengan pembiayaan bersumber pada DIPA. Sedangkan penanganan Dampak Risiko dilakukan dengan klarifikasi ke media masa terkait dengan pemberitaan yang memperburuk citra Pengadilan, serta melakukan upaya penyelamatan aset-aset dan dokumen-dokumen saat Peristiwa Bencana Alam atau Kebakaran. Penyelamatan dan peningkatan pengamanan oleh petugas persidangan juga dilakukan sebagai upaya penanganan dampak risiko gangguan keamanan persidangan.

#### 6. Monitoring dan Reviu

Monitoring dan Reviu dilakukan dengan cara memonitoring perkembangan dan hambatan Penanganan Risiko yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di bawahnya dengan mengacu pada Rencana Penanganan Risiko. Hasil Monitoring dan Evaluasi kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko.

#### 7. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan Konsultasi dilakukan melalui pelaporan secara periodik dan berjenjang atas perkembangan dan hambatan terhadap pelaksanaan Rencana Penanganan Risiko pada Pengadilan Negeri Arga Makmur kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

### C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dalam Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II disajikan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II ini.

### D. SIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Simpulan

Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah salah satu upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang pada muaranya adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan.

#### 2. Saran

Manajemen Risiko perlu disusun dengan lebih komprehensif dengan pendekatan yang holistik sehingga didapatkan pemahaman yang utuh akan peran masing-masing komponen dalam struktur organisasi yang pada akhirnya tercermin dalam budaya kerja yang sadar risiko.

Penanganan Risiko membutuhkan komitmen bersama dan kerjasama dari semua komponen dalam organisasi. Oleh karena itu kondusifitas kantor harus terus dijaga dan diupayakan sehingga semua komponen dalam struktur organisasi dapat menjalin kerjasama yang semakin erat sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama.

### E. PENUTUP

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan globalisasi memunculkan

potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusun menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga Laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II.

Dibuat di : Arga Makmur  
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Ketua Tim Manajemen Risiko  
Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II



**P.H.H PATRA SIANIPAR, S.H., M.H.**

**LAMPIRAN I**  
**FORMULIR REGISTER RISIKO**  
**PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR KELAS II**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**Form - 1**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**

**Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum**

**Pengadilan Tinggi Bengkulu**

**Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II**

No	Kegiatan Utama	Tujuan dari Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelesaian sisa perkara Tahun 2023 dan perkara masuk Tahun 2024 secara tepat waktu	Menyelesaikan Sisa perkara tahun 2023 dan perkara masuk tahun 2024 secara tepat waktu	1 Menerima perkara Pidana biasa (Dewasa), Perkara Pidana Anak, Perkara Pidana Singkat, Perkara Pidana Tipiring, Perkara Tilang, Perkara Pidana Pemilu, Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan, Perkara Perdata Permohonan, Perkara Perdata Gugatan Sederhana	1 Pelaksana berhalangan hadir/Tidak di tempat	1 Cuti, Sakit, Dinas Luar, Sidang	1 Penerimaan Perkara mengalami penundaan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				2 Pelaksana yang masih baru/belum berpengalaman	1 Pergantian petugas karena mutasi, baik internal maupun eksternal	1 Penerimaan Perkara Membutuhkan waktu yang lebih lama	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				3 Peralatan (Hardware/Software) mengalami kerusakan maupun gangguan	1 Peralatan yang spesifikasinya sudah tidak memadai untuk menjalankan aplikasi terbaru	1 Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
					2 Peralatan yang masa pakainya sudah lama dan tidak bisa ditingkatkan (upgrade) lagi	2 Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	
					3 Kekurangan daya listrik	3 Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	

						4	Aplikasi yang belum diperbaharui (Upgrade) ke versi Terbaru	4	Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan		
						5	Serangan Virus	5	Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan		
					4	Peralatan tidak bisa di operasikan	1	Pemadaman Listrik, banjir, gempa bumi, unjuk rasa, maupun kekerasan di ruang persidangan	1	Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
							2	Kerusakan pada instalasi listrik kantor	1	Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	
					5	Jaringan Internet/Intranet mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik	1	Hotspot Rusak	1	Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
							2	LAN Card Rusak	1	Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	
							3	Serangan Virus	1	Proses penginputan perkara tidak bisa dilakukan	
							4	Pembatasan oleh Provider	1	Proses Penerimaan Perkara tidak bisa dilakukan	
							5	Penggunaan Data yang cukup besar oleh Pengguna lain	1	Proses Penerimaan Perkara tidak bisa dilakukan	

				6	Berkas yang diajukan oleh Penuntut Umum/Penggugat/Pemohon/Kuasa Hukum/Penasihat Hukum tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan	1	Penuntut Umum/Penggugat/Pemohon/Kuasa Hukum/Penasihat Hukum tidak mengetahui syarat kelengkapan berkas/ tidak teliti dalam menyusun berkas perkara	1	Proses Pendaftaran perkara tidak bisa dilanjutkan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata	
			2	Memeriksa dan memutus, perkara Pidana biasa (Dewasa), Perkara Pidana Anak, Perkara Pidana Singkat, Perkara Pidana Tipiring, Perkara Tilang, Perkara Pidana Pemilu, Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan, Perkara Perdata Permohonan, Perkara Perdata Gugatan Sederhana	1	Petugas berhalangan	1	Cuti, Sakit, Dinas Luar	1	Proses persidangan terhambat atau tertunda	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				2	Terdakwa berhalangan hadir di persidangan	1	Sakit		1	Proses persidangan terhambat atau tertunda	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
				3	Para pihak berhalangan hadir di persidangan	1	Kepentingan Pribadi para pihak		1	Proses persidangan terhambat atau tertunda	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata



					4	Masa Penahanan yang hampir habis	1	Proses persidangan yang beberapa kali mengalami penundaan	1	Terdakwa berpotensi bebas	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
							2	Banyaknya saksi yang diperiksa			
					5	Saksi berhalangan hadir di persidangan	1	kepentingan pribadi Saksi	1	Proses persidangan terhambat atau tertunda	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
					6	Hakim/PP atau pihak-pihak tidak siap melaksanakan agenda sidang yang semestinya	1	Hakim tidak siap dengan dokumen yang akan digunakan atau dibacakan pada saat sidang	1	Proses persidangan memerlukan waktu yang lama	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
					7	Berita Acara Persidangan terlambat diselesaikan	1	Peralatan (hardware/software) tidak berfungsi dengan baik	1	Proses persidangan memerlukan waktu yang lama	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
							2	Belum tersedia alat ATR untuk mempermudah penyusunan Berita Acara Sidang			
							3	Kelebihan beban kerja karena menangani terlalu banyak perkara			
							4	Jumlah Panitera Pengganti yang mengalami penurunan karena pensiun atau mutasi sedangkan penggantinya belum siap			

					8	Gangguan keamanan	1	Tindakan Terdakwa, para pihak atau pengunjung sidang yang membahayakan Hakim/PP/Pegawai, huru-hara, aksi massa di Pengadilan	1	Keamanan Hakim/PP/Pegawai terancam sehingga tidak tenang dalam melaksanakan persidangan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
									2	Proses persidangan terhambat atau tertunda	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
									3	Pemberitaan negatif di media massa sehingga citra Pengadilan menjadi tidak baik	Ketua Pengadilan
			3	Menyelesaikan berkas perkara Pidana biasa (Dewasa), Perkara Pidana Anak, Perkara Pidana Singkat, Perkara Pidana Tipiring, Perkara Tilang, Perkara Pidana Pemilu, Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan, Perkara Perdata Permohonan, Perkara Perdata Gugatan Sederhana	1	Panitera Pengganti terlambat melakukan minutasi	1	Panitera Pengganti belum menyelesaikan penyusunan berkas	1	Proses penyelesaian berkas perkara melebihi waktu yang ditentukan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
								2	Petugas tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit	1	
					2	Petugas penerima berkas yang akan diminutasi tidak ada	1	cuti, sakit, atau dinas luar	1	penyetoran berkas tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Hukum

					3	Berkas perkara yang diminutasi tidak lengkap	1	petugas kurang teliti	1	berkas perkara tidak bisa diterima dan diminutasi	Panitera Muda Hukum
					4	Susunan berkas tidak sesuai dengan ketentuan	1	petugas kurang teliti	1	berkas perkara tidak bisa diterima dan diminutasi	Panitera Muda Hukum
					5	Gangguan pada sistem penerimaan berkas di kearsipan	1	kerusakan/gangguan komputer, aplikasi, dan jaringan	1	berkas perkara tidak bisa diarsipkan pada tempatnya	Panitera Muda Hukum
2	Penyelesaian Perkara dengan memberikan Putusan yang berkualitas kepada Pencari Keadilan	Meningkatkan Kepuasan pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan	1	Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	1	Petugas tidak bisa bersikap netral dalam menangani suatu perkara	1	petugas mempunyai benturan kepentingan	1	Pencari keadilan merasa belum mendapatkan keadilan sehingga tidak bisa menerima putusan Pengadilan dan melakukan upaya hukum	Ketua Pengadilan
									2	tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan menurun	
3	Penyelesaian Perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum melalui Diversi	Meningkatkan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan Hukum melalui Diversi pada tahun 2024	1	Melaksanakan proses Diversi Perkara Pidana Anak yang berkonflik dengan Hukum	1	Korban atau orang tua korban tidak bisa menerima perbuatan pelaku terhadap korban	1	pelaku dikenal memiliki sikap yang tidak baik di masyarakat atau lingkungannya. Dengan kata lain pelaku memiliki rekam jejak yang buruk	1	Diversi Gagal	Panitera Muda Pidana

					2	Pihak Korban tidak bisa menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh pelaku	1	ganti rugi yang ditawarkan di nilai tidak sepadan dengan akibat yang diderita korban	1	Diversi Gagal	Panitera Muda Pidana
4	Pelayanan yang Prima kepada Pencari Keadilan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Memberikan pelayanan sesuai dengan standar kepada pengguna Pengadilan	1	Pengguna Pengadilan kecewa terhadap pelayanan Pengadilan	1	SOP tidak berjalan sebagaimana mestinya dan nilai-nilai budaya kerja tidak sepenuhnya diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna Pengadilan	1	Pengguna Pengadilan melakukan pengaduan	Ketua Pengadilan
									2	Indeks Kepuasan Masyarakat Menurun	
									3	Citra Pengadilan menjadi buruk	
									4	Kepercayaan Masyarakat kepada Pengadilan menjadi Menurun	
					2	Biaya perkara tidak transparan dan akuntabel	1	petugas melakukan kecurangan (fraud)	1	Kerugian keuangan perkara	Panitera Muda Perdata
									2	Sanksi bagi petugas	
									3	Pengguna Pengadilan melakukan pengaduan	

			2	Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1	Menurunnya daya dukung Gedung kantor, serta sarana dan prasarana kantor mengalami kerusakan/gangguan	1	Bencana Alam	1	Pelayanan Pengadilan terganggu atau terhenti	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
							2	Kebakaran	2	Kenyamanan dan keamanan pengguna Pengadilan terganggu	
							3	Pemeliharaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai jadwal yang seharusnya	3	Sarana dan prasarana kantor tidak berfungsi dengan optimal atau bahkan tidak bisa difungsikan kembali	
							4	Kurangnya biaya pemeliharaan			
							5	Pasokan daya listrik yang kurang memadai atau tidak stabil			
			3	Menangani Pengaduan	1	Pelanggaran Peraturan perundang-undangan dan kode etik	1	Aparatur Pengadilan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya atau melawan hukum	1	Sanksi bagi Aparatur yang melanggar	Panitera Muda Hukum
									2	Sanksi bagi Pimpinan	
									3	Pemberitaan negatif di yang menjatuhkan citra Pengadilan	

								4	Tingkat Kepercayaan masyarakat menurun		
			4	Memberikan Informasi yang benar kepada masyarakat	1	Pemberitaan negatif yang menyudutkan Pengadilan	1	Media Massa menyajikan informasi yang kurang berimbang	1	Citra Pengadilan menjadi buruk	Panitera Muda Hukum
								2	Pihak Oknum tertentu yang menyebarkan Hoax	2	Tingkat Kepercayaan masyarakat menurun
5	Penyampaian Putusan perkara Pidana kepada Terdakwa	Memastikan isi Putusan diterima oleh Terdakwa tepat waktu	1	Menyelesaikan pemberitahuan isi Putusan kepada Terdakwa	1	Kekurangan biaya untuk menyampaikan putusan	1	Terdakwa yang tidak ditahan bertempat tinggal di luar wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur	1	isi putusan tidak bisa disampaikan	Panitera Muda Pidana
								2	Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA mengacu kepada jumlah perkara tahun lalu, sedangkan jumlah perkara tahun ini meningkat/lebih banyak		
6	Pelaksanaan Mediasi	Meningkatkan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1	Melaksanakan dan menyelesaikan Mediasi	1	Masing-masing pihak merasa berada pada posisi yang benar	1	Masing-masing pihak kurang memahami Prosedur Hukum	1	Mediasi Gagal	Panitera Muda Perdata
					2	Masing-masing pihak tidak sepakat dengan opsi/solusi yang ditawarkan oleh Mediator	1	Masing-masing tidak mau mempertimbangkan akibat-akibat yang bisa terjadi jika perkaranya tetap dilanjutkan			

7	Pengajuan berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Memastikan berkas Perkara Banding, Kasasi, dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu	1	Menerima permohonan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK perkara Pidana maupun Perdata	1	Relaas Pemberitahuan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK Perkara Pidana maupun Perdata belum diterima sampai batas waktu pengajuan banding	1	Delegasi kepada PN yang dituju terlambat dalam menyampaikan Relaa Pemberitahuan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK perkara Pidana maupun Perdata	1	Pengajuan Berkas Perkara Upaya Hukum Banding tidak bisa segera dilakukan	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
									2	Berkas Perkara Banding di kirim tanpa Relaa	
					2	Pemohon tidak melengkapi berkas dengan memori PK pada saat pengajuan Permohonan PK	1	Pemohon belum siap dengan alasan PK	1	Permohonan PK tidak bisa diterima hingga pemohon melengkapi alasan PK	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata
									2	Permohonan PK ditolak jika sampai batas waktu terakhir pemohon tidak bisa melengkapi alasan PK	
8	Penyelesaian Perkara Prodeo	Menyelesaikan perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2024	1	Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan Perkara Prodeo	1	Masyarakat tidak melengkapi persyaratan Surat Keterangan miskin	1	Masyarakat malu mencari Surat Keterangan Miskin	1	Permohonan Perkara Prodeo tidak bisa diterima	Panitera Muda Perdata

					2	Hampir tidak pernah ada yang mengajukan Perkara Prodeo	1	Kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat	1	Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo tidak dialokasikan lagi dalam DIPA	
9	Pelaksanaan Persidangan di luar Gedung Pengadilan	Meningkatkan akses masyarakat kurang mampu atau terpinggirkan melalui penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan	1	Menerima, Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di luar gedung Pengadilan	1	Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan dengan mudah	1	Memerlukan Koordinasi dan kesiapan instansi terkait	1	Sidang diluar Gedung Pengadilan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana	Panitera Muda Pidana
					2	Mobilisasi petugas dan alat-alat penunjang persidangan, serta penyiapan tempat sidang memerlukan waktu dan biaya	1	Lokasi Persidangan yang jauh dari kantor	1	Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan menjadi terhambat atau tidak bisa dilaksanakan	Panitera Muda Pidana
10	Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan hukum	Memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada Pencari Keadilan Golongan	1	Mengadakan Layanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat secara gratis dan menyelesaikan segala pembenaran atas DIPA untuk Kegiatan tersebut	1	Keterlambatan dalam menunjuk pihak Penyedia Jasa Bantuan Hukum	1	Proses pengadaan Penyedia jasa Posbakum mengalami hambatan	1	Pelayanan Bantuan Hukum kepada masyarakat menjadi Tertunda	Panitera Muda Hukum
					2	Waktu pelayanan Bantuan Hukum kurang memadai	1	Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam DIPA	1	Pelayanan Bantuan Hukum kepada masyarakat dibatasi sampai hari tertentu dan hanya 2 sampai 3 jam per hari	Panitera Muda Pidana



11	Pelaksanaan Eksekusi	Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1	Menerima dan menyelesaikan Permohonan Eksekusi	1	Gangguan dan ancaman keamanan terhadap pelaksanaan Eksekusi	1	Adanya perlawanan fisik dari pihak/masyarakat yang berkeberatan dengan pelaksanaan Eksekusi	1	Eksekusi tertunda atau tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana	Ketua Pengadilan
							2	Koordinasi antar pihak terkait kurang baik	2	Keselamatan Petugas terancam sehingga tidak bisa melaksanakan eksekusi dengan tenang	
							3	Jumlah personil pengamanan yang kurang memadai			
					2	Obyek sengketa yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan	1	Batas-batas obyek sengketa telah bergeser atau kondisi obyek sengketa telah bergeser atau kondisi obyek sengketa telah berubah	2	Eksekusi tidak bisa dilaksanakan	
14	Penyelesaian perkara melalui e-court	Layanan pendaftaran perkara secara online.		Layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapat taksiran panjar biaya perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.	1	Jaringan Internet/Intranet mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik	1	Hotspot Rusak	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Perdata
					2	Peralatan tidak bisa di operasikan	1	Pemadaman Listrik, banjir, gempa bumi, unjuk rasa, maupun kekerasan di ruang persidangan	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Perdata

						2	Kerusakan pada instalasi listrik kantor	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Perdata
					3	Peralatan dan jaringan internet yang tidak memadai di lingkungan pemohon	1	Peralatan yang spesifikasinya sudah tidak memadai untuk menjalankan aplikasi terbaru	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Perdata
						2	Peralatan yang masa pakainya sudah lama dan tidak bisa ditingkatkan (upgrade) lagi	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Perdata
15	Pelayanan surat keterangan online eraterang	Layanan surat keterangan secara elektronik	Permohonan surat keterangan secara elektronik, berupa surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana, Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, Surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.	1	Jaringan Internet/Intranet mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik	1	Hotspot Rusak	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Hukum

					2	Peralatan tidak bisa dioperasikan	1	Pemadaman Listrik, banjir, gempa bumi, unjuk rasa, maupun kekerasan di ruang persidangan	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Hukum	
								2	Kerusakan pada instalasi listrik kantor	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Hukum
					3	Peralatan dan jaringan internet yang tidak memadai di lingkungan pemohon	1	Peralatan yang spesifikasinya sudah tidak memadai untuk menjalankan aplikasi terbaru	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Hukum	
								2	Peralatan yang masa pakainya sudah lama dan tidak bisa ditingkatkan (upgrade) lagi	1	Proses pendaftaran perkara tidak bisa dilakukan	Panitera Muda Hukum
16	Aplikasi sistem informasi kepegawaian	Aplikasi SIKEP untuk merekam data dan dokumen elektornik pegawai	Merekam data dan dokumen elektornik pegawai	1	Data Kepegawaian dari masing-masing pegawai tidak bisa dilengkapi, akibatnya data tidak valid dan tidak lengkap	1	Data Kepegawaian dari masing-masing pegawai tidak lengkap	1	Proses penginputan data kepegawaian tidak bisa dilakukan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana		
					2	Aplikasi tidak dapat digunakan apabila tidak ada jaringan internet	1	Kerusakan pada instalasi listrik kantor	1	Proses penginputan data kepegawaian tidak bisa dilakukan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	
								2	Hotspot Rusak	1	Proses penginputan data kepegawaian tidak bisa dilakukan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

17	Presensi elektronik manual dan Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional)	Melakukan absen secara elektronik (finger)	1	Melakukan absen secara elektronik (finger) dan manual dan melakukan rekapitulasi absen	1	Presensi elektronik (finger) tidak dapat berjalan apabila tidak ada arus listrik/ mati lampu akibatnya presensi elektronik tidak bisa direkapitulasi.	1	Kerusakan pada instalasi listrik kantor	1	Proses absensi elektronik (finger) tidak dapat dilakukan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
		Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) diisi berdasarkan data presensi elektronik (finger) dan manual	2	Setelah melakukan absen secara elektronik (finger) dan manual serta melakukan rekapitulasi absen, kemudian menginput pada aplikasi Komdanas	2	Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) diisi berdasarkan data presensi elektronik (finger) dan manual, apabila data yang dimasukkan pada Komdanas terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dengan Absen finger dan manual, maka pegawai bisa dipotong Remunerasi atau uang makan.	1	Kerusakan pada instalasi listrik kantor		Proses penginputan absen tidak dapat dilakukan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
							2	Hotspot Rusak		Proses penginputan absen tidak dapat dilakukan	

18	Ketersediaan jumlah Aparatur Sipil Negara atau personil setiap bidang di Pengadilan Negeri Arga Makmur yang tidak memadai	Aparatur Sipil Negara atau personil setiap bidang di Pengadilan Negeri Arga Makmur mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Tukoksi masing-masing	1	Setiap bidang di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan memiliki Tupoksi masing-masing yang dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara atau personil di Pengadilan Negeri Arga Makmur	1	Setiap bidang di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan tidak dapat berjalan sesuai dengan Tupoksi masing-masing	1	Kekurangan Aparatur Sipil Negara atau personil pada Pengadilan Negeri Arga Makmur	1	Terjadinya rangkap jabatan atau diperbantukan pada bidang-bidang yang kosong	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
19	Penatausahaan surat masuk dan keluar pada aplikasi PTSP	Menggunakan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam penginputan Surat Masuk dan Keluar	1	Penginputan surat masuk dan keluar dilakukan menggunakan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1	Surat masuk diterima di Sub Bagian Umum dan Keuangan menjelang berakhirnya jam kerja/ jumat sore/ menjelang hari libur sehingga informasi-informasi kedinasan akan terhambat yang berdampak pada pelayanan masyarakat akan terhambat dan bisa berimbas pada nama Institusi secara keseluruhan	1	Kerusakan pada instalasi listrik kantor	1	Proses penginputan surat tidak bisa dilakukan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
							2	Hotspot Rusak	2	Proses penginputan surat tidak bisa dilakukan	

							3	Dikarenakan kesibukan tugas lain sehingga pimpinan tidak dapat segera memberi disposisi surat sehingga apabila surat tersebut berhubungan dengan perkara maka akan menghambat proses penyelesaian perkara	3	Proses pendistribusian surat dapat terkendala	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
20	Penatausahaan BMN	Tercatat secara tertib pada setiap BMN	1	Mencatat dan membuat DBR (Daftar Barang Ruang) pada setiap BMN yang ada di Pengadilan Negeri Arga Makmur di setiap ruangan	1	Posisi BMN tidak sesuai dengan tempat yang tercantum dalam DBR Kehilangan BMN yang ada pada penanggung jawab BMN	1	Kesulitan dalam melakukan opname fisik barang	1	BMN yang ada pada setiap ruangan tidak sesuai dengan DBR	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	Pengelolaan Perpustakaan	Sarana informasi bagi masyarakat	2	Mencatat dan memilah jenis buku yang terdapat di perpustakaan	2	Kurangnya minat pengunjung untuk mencari informasi melalui buku-buku di perpustakaan	2	Belum ada SDM yang berkompeten di bidang perpustakaan	2	Pengelolaan perpustakaan tidak maksimal	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
21	Pengelolaan Website dan Sosial media	Sarana informasi bagi masyarakat	1	Media penyampaian informasi kepada masyarakat berupa profil pengadilan,	1	Untuk mengakses Website dan Media Sosial diperlukan koneksi internet yang baik	1	Hotspot Rusak	1	Website dan Media Sosial tidak dapat diakses	Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan

					Perusak aplikasi/ Data Website/ Hacker yang dapat merugikan sistem/ kinerja Pengadilan Negeri yang sudah berbasis website, karena data maupun aplikasi yang ada sangat rentan dirusak bahkan dihapus atau dicuri	2	Adanya Hacker	2	Website dan Media Sosial tidak dapat diakses	Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
22	Pengelolaan Server	Sarana penunjang SIPP dan Backup data SIPP	1	Penginputan data perkara dalam SIPP	1	Jaringan Internet/Intranet mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu proses penginputan data dalam SIPP	1	Hotspot Rusak	SIPP tidak dapat diakses	Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
							2	Kerusakan pada instalasi listrik kantor	SIPP tidak dapat diakses	Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan

Keterangan :

Pengisian form di atas disesuaikan dengan unit kerja yang bersangkutan

Cara Pengisian Kolom :

1, Diisi dengan nomor urut kegiatan (kita tentukan sendiri)

2, Diisi dengan nama kegiatan yang menjadi sasaran mapping

3. Diisi dengan tujuan pelaksanaan kegiatan
4. Diisi dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud

5. Diisi dengan risiko dari masing-masing tahapan/proses kegiatan, berdasarkan pengalaman selama ini serta kemungkinannya. Jumlah risiko tidak dibatasi. Uraian ini bisa dengan menggunakan
6. Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan risiko itu terjadi, bisa dari dimensi internal maupun eksternal
7. Penyebab risiko dimaksud adalah hal yang berada dalam ranah kontrol kita, bukan yang bersifat uncontrollable
8. Diisi dengan keadaan yang terjadi jika risiko tersebut benar-benar terjadi, bisa menggunakan pendekatan dimensi finansial, kinerja, reputasi, maupun tuntutan hukum
9. Diisi dengan nama jabatan eselon terendah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, yang merupakan pemilik risiko



**LAMPIRAN II**  
**STATUS RISIKO YANG MELEKAT/BAWAAN (INHERENT RISK)**  
**PENGADILAN NEGERI ARGAS MAKMUR KELAS II**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Form - 2

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**  
**Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum**  
**Pengadilan Tinggi Bengkulu**  
**Pengadilan Negeri Argas Makmur Kelas II**

- VISI** : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ARGAS MAKMUR YANG AGUNG
- MISI** :
  1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Argas Makmur
  2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kinerja di Pengadilan Negeri Argas Makmur
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Argas Makmur
- TUJUAN** :
  1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- SASARAN** :
  1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
  2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
  4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

*Laporan Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Argas Makmur*

Ref. Kegiatan	URAIAN RISIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3		4		5	
1	Pelaksana berhalangan hadir/tidak di tempat	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
	Pelaksana yang masih baru/belum berpengalaman	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
2	Peralatan Hardware/Software mengalami kerusakan/gangguan	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
	Peralatan tidak bisa dioperasikan	5	Hampir Pasti Terjadi	2	Sangat Rendah	10	Tinggi
	Jaringan Internet/Intranet mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
3	Berkas yang diajukan oleh Pengguna tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang di isyaratkan	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
4	Petugas berhalangan	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
	Terdakwa berhalangan hadir di persidangan	4	Kemungkinan besar Terjadi	1	Sangat Rendah	4	Rendah
	Para Pihak berhalangan hadir di persidangan	4	Kemungkinan besar Terjadi	3	Sedang	12	Tinggi
5	Masa Penahanan yang hampir habis	4	Kemungkinan besar Terjadi	4	Tinggi	16	Tinggi
	Saksi berhalangan hadir di persidangan	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
	Petugas atau pihak-pihak tidak siap melaksanakan agenda sidang yang semestinya	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
	Berita Acara Persidangan terlambat diselesaikan	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
6	Gangguan Keamanan	2	Kemungkinan kecil Terjadi	3	Sedang	6	Moderat
7	Petugas terlambat melakukan minutas	3	Mungkin Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Rendah
	Petugas penerima berkas yang akan di minutas tidak ada	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
	Berkas Perkara yang diminutas tidak lengkap	3	Mungkin Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Rendah
	Susunan berkas tidak sesuai dengan ketentuan	3	Mungkin Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Rendah

Ref. Kegiatan	URAIAN RISIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3		4		5	
8	Gangguan pada sistem penerimaan berkas di kearsipan	3	Mungkin Terjadi	1	Sangat Rendah	3	Rendah
9	Petugas tidak bisa bersikap netral dalam menangani suatu perkara	2	Kemungkinan kecil Terjadi	3	Sedang	6	Moderat
10	Korban atau orang tua korban tidak bisa menerima perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku terhadap korban	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
	Pihak Korban tidak bisa menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak pelaku	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
11	Pengguna Pengadilan kecewa terhadap Pelayanan Pengadilan	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
12	Biaya Perkara tidak transparan dan akuntabel	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
13	Menurunnya daya dukung Gedung Kantor, serta sarana dan prasarana kantor mengalami kerusakan/gangguan	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
14	Pemberitaan Negatif atau penyebaran informasi yang salah yang menyudutkan Pengadilan	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
15	Kekurangan biaya untuk menyampaikan isi putusan	3	Mungkin Terjadi	5	Sangat tinggi	15	Ekstrim/Sangat Tinggi
16	Masing-masing pihak merasa berada pada posisi yang benar	4	Kemungkinan besar Terjadi	3	Sedang	12	Tinggi
	Masing-masing pihak tidak sepakat dengan opsi/solusi yang ditawarkan oleh Mediator	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat
17	Relaas upaya Banding belum diterima sampai batas waktu pengajuan Berkas Banding	3	Mungkin Terjadi	1	Sangat Rendah	9	Rendah
	Pemohon tidak melengkapi Permohonan PK dengan Memori PK pada saat pengajuan Permohonan PK	3	Mungkin Terjadi	1	Sangat Rendah	9	Rendah
18	Masyarakat tidak melengkapi persyaratan Surat Keterangan Miskin	3	Mungkin Terjadi	1	Sangat Rendah	9	Rendah
	Hampir tidak pernah ada yang mengajukan Prodeo	4	Kemungkinan besar Terjadi	1	Sangat Rendah	4	Rendah
19	Penentuan waktu dan Tempat pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan tidak mudah	3	Mungkin Terjadi	3	Sedang	9	Moderat

Ref. Kegiatan	URAIAN RISIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3		4		5	
	Mobilisasi petugas dan alat-alat penunjang persidangan, serta penyiapan tempat sidang memerlukan waktu dan biaya	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
20	Keterlambatan dalam Menunjuk pihak Penyedia Jasa Bantuan Hukum	2	Kemungkinan kecil Terjadi	5	Sangat tinggi	10	Tinggi
	Waktu Pelayanan Bantuan Hukum kurang memadai	5	Hampir Pasti Terjadi	1	Sangat Rendah	5	Moderat
21	Gangguan dan ancaman keamanan terhadap pelaksana eksekusi	3	Mungkin Terjadi	5	Sangat tinggi	15	Ekstrim/Sangat Tinggi
	Obyek sengketa yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan	3	Mungkin Terjadi	5	Sangat tinggi	15	Ekstrim/Sangat Tinggi

Cara Pengisian Kolom :

1. Diisi dengan nomor kegiatan, sesuai penomoran pada Form -1
2. Diisi dengan mengcopy uraian resiko pada Form -1
3. Diisi dengan berdasarkan pendapat subyektif kita, tentang tingkat kemungkinan terjadinya resiko yang dimaksud. Pedoman untuk memberikan penilaian pada lembar berikutnya
4. Diisi dengan jawaban atas pertanyaan : "jika resiko itu terjadi, maka akan berdampak.... Terhadap pencapaian tujuan kegiatan". Pengisian tersebut juga bersifat subyektif dan pedoman untuk memberikan penilaian pada lembar berikutnya
5. Diisi dengan hasil perkalian antara kemungkinan/probabilitas dan dampak (nilai kolom 3 dan nilai kolom 4)

**LAMPIRAN III**  
**STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) PENGADILAN NEGERI ARGAS MAKMUR KELAS II**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Form - 3

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**

**Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Bengkulu**

**Pengadilan Negeri Argas Makmur Kelas II**

**VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ARGAS MAKMUR YANG AGUNG**

**MISI :**

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Argas Makmur**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Argas Makmur**
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Argas Makmur**

**TUJUAN :**

- 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi**
- 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan**

**SASARAN :**

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**
- 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**
- 4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4			5	6			7		8		9		10	
1.	Pelaksana berhalangan hadir/tidak di tempat	5	Moderat	1	Menunjuk PLH	Efektif	1 s/d 10	1	Kemungkinan tidak terjadi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
	Pelaksana yang masih baru/belum berpengalaman	5	Moderat	1	Menyediakan SOP dan Instruksi kerja	Efektif	1 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
2	Peralatan Hardware/Software mengalami kerusakan/ganggu	5	Moderat	1	Melakukan penggantian suku cadang /Upgrade	Efektif	1 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
				2	Mengajukan usul pengadaan alat pengolah data	Efektif											
				3	mengajukan penambahan daya listrik	Efektif											
				4	melakukan update aplikasi versi terbaru	Efektif											
				5	mengalokasi kan belanja antivirus dan memasang antivirus	Efektif											
3	Peralatan tidak bisa dioperasikan	10	Tinggi	1	Menyediakan Genset	Efektif	1 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
				2	melakukan pemeliharaan instalasi listrik	Efektif											
4	jaringan internet/intranet mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik	5	Moderat	1	melakukan perbaikan atau penggantian hotspot	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
				2	melakukan perbaikan atau penggantian LAN Card	Efektif											
				3	membeli dan memasang antivirus	Efektif											
				4	melayangkan complain ke provider	Efektif											
				5	mengatur penggunaan bandwidth melalui router	Efektif											
5	Berkas yang diajukan oleh pengguna tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang diisyaratkan	5	Moderat	1	menyediakan daftar kelengkapan berkas untuk pengguna	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
6	Petugas berhalangan	5	Moderat	1	Menunjuk PLH atau diambil alih oleh atasan langsung atau menunjuk petugas yang lain untuk	Efektif	1 s/d 10	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10			
7	Terdakwa berhalangan hadir di persidangan	4	Rendah	1	Menunda sidang	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
8	Para Pihak berhalangan hadir di persidangan	12	Tinggi	1	Menyusun Court Calender sehingga pihak-pihak yang bersidang sudah mempersiapkan diri untuk acara persidangan	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
9	Masa penahanan yang hampir habis	16	Tinggi	1	mengajukan perpanjangan penahanan kepada KPN atau KPT	Efektif	1 s/d 10	1	Kemungkinan tidak terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
10	Saksi berhalangan hadir di persidangan	9	Moderat	1	Menyusun Court Calender sehingga pihak-pihak yang bersidang sudah mempersiapkan diri untuk acara persidangan	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah



REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
11	Petugas atau pihak-pihak tidak siap melaksanakan agenda sidang yang semestinya	9	Moderat	1	Menyusun Court Calender sehingga pihak-pihak yang bersidang sudah mempersiapkan diri untuk acara persidangan	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
12	Berita Acara persidangan terlambat diselesaikan	9	Moderat	1	melakukan pemeliharaan dan update aplikasi secara berkala	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
				2	Mengajukan pengadaan ATR untuk memudahkan penyusunan Berita Acara Sidang	Efektif											
				3	Subbagian Kepegawaian Ortala melakukan Analisis Beban kerja	Efektif											

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
				4	Subbagian Kepegawaian Ortala mengajukan Rencana kebutuhan pegawai	Efektif											
13	Gangguan keamanan	6	Moderat	1	Melaksanakan pengamanan sidang bekerja sama dengan Polres Bengkulu Utara sesuai dengan alokasi anggaran dan kegiatan dalam RKAKL	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
				2	Memasang tata tertib menghadiri persidangan	Efektif											
				3	Melakukan pemeriksaan dengan metal detector terhadap pengunjung yang akan memasuki ruang sidang	Efektif											
				4	Menata jalur evakuasi huru-hara	Efektif											
				5	Melaksanakan simulasi penanganan huru-hara	Efektif											

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
14	Petugas terlambat melakukan minutasi	3	Rendah	1	Panitera Pengganti menggunakan aplikasi SIPP dan MIS untuk memantau perkara sehingga bisa mempersiapkan minutasi	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
				2	Panitera menunjuk petugas untuk menyusun berkas jika PP yang bersangkutan yang sakit												
15	Petugas penerima berkas yang akan diminutasi tidak ada	5	Moderat	1	Menunjuk PLH	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
16	Berkas perkara yang diminutasi tidak lengkap	3	Rendah	1	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata memberikan daftar kelengkapan berkas kepada Panitera Pengganti	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
	Susunan berkas tidak sesuai dengan ketentuan			1	Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata memberikan pedoman susunan berkas perkara kepada Panitera Pengganti	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
17	Gangguan pada sistem penerimaan berkas di kearsipan	3	Rendah	1	Kepala Subbagian PTIP atau pranata komputer atau admin SIPP melakukan pemeliharaan komputer dan jaringan serta melakukan update aplikasi SIPP untuk memastikan sistem penerimaan arsip perkara dalam keadaan siap digunakan	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
18	Petugas tidak bisa bersikap netral dalam menangani suatu perkara	6	Moderat	1	Hakim atau Panitera Pengganti membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menolak untuk menangani perkara tersebut	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
19	Korban atau orang tua korban tidak bisa menerima perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku terhadap korban	9	Moderat	1	Hakim menjelaskan kepada korban atau orang tua korban mengenai konsep restoratif justice dan menekankan pada masa depan pelaku yang masih anak-anak serta dampak kejiwaan terhadap pelaku lebih didasarkan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan dikarenakan pelaku masih belum bisa menyaring apa yang baik dan yang buruk bagi dirinya sehingga upaya terbaik adalah mengembalikan pelaku kepada orang tua untuk dibina. Disamping itu pula dijelaskan mengenai dampak kejiwaan terhadap korban jika ia tidak mau memaafkan pelaku	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
20	Korban atau orang tua korban tidak bisa menerima perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku terhadap korban	9	Moderat	1	Hakim menjelaskan kepada korban atau orang tua korban mengenai konsep restoratif justice dan menekankan pada masa depan pelaku yang masih anak-anak serta dampak kejiwaan terhadap pelaku jika ia dipidana. Bahwa perbuatan pelaku lebih didasarkan pengaruh buruk lingkungan dikarenakan pelaku masih belum bisa menyaring apa yang baik dan yang buruk bagi dirinya sehingga upaya terbaik adalah mengembalikan pelaku kepada orang tua untuk dibina.	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
21	Pengguna Pengadilan kecewa terhadap pelayanan pengadilan	9	Moderat	1	Melaksanakan pemantauan proses untuk memastikan SOP berjalan sebagaimana mestinya	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
				2	Melakukan revisi SOP jika ada perubahan dasar hukum atau proses serta menyusun instruksi kerja jika ada aplikasi yang baru	Efektif											
				3	Melaksanakan pelatihan frontliner kepada Petugas PTSP	Efektif											
				4	Melaksanakan Survei Kepuasan masyarakat	Efektif											
				5	Melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi	Efektif											
				6	Melaksanakan Survei Kepuasan Layanan Petugas PTSP	Efektif											
22	Biaya Perkara tidak transparan dan akuntabel	9	Moderat	1	Menerapkan E-Skum dan E-Biling	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
				2	Pelaporan Biaya Perkara	Efektif											



REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
23	Menurunnya daya dukung Gedung Kantor serta sarana dan prasarana kantor mengalami kerusakan/gangguan	9	Moderat	1	Mengganggu biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan melakukan revisi anggaran jika kurang	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
				2	melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara berkala maupun insidental	Efektif											
				3	Mengajukan renovasi gedung kantor Pengadilan	Efektif											
				4	Menyediakan APAR serta melaksanakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Efektif											
				5	mengajukan penambahan daya listrik	Efektif											
24	Pelanggaran peraturan dan kode etik	9	Moderat	1	Mendata dan memperbaharui dasar hukum-dasar hukum yang dipakai	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
				2	Pimpinan mensosialisasikan dan menerapkan PERMA Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016	Efektif											
				3	Seluruh aparaturnya membuat dan menandatangani Pakta Integritas	Efektif											
25	Pemberitaan negatif atau penyebaran informasi yang salah yang menyudutkan Pengadilan	9	Moderat	1	Humas atau Juru Bicara melakukan klarifikasi ke Media Massa	Efektif	1 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
26	Kekurangan biaya untuk menyampaikan putusan	15	Ekstrim/ Sangat Tinggi	1	Subbagian PTIP mengajukan revisi untuk menambah anggaran pengiriman putusan atas usulan PPK kepada KPA	Efektif	1 s/d 10	1	Kemungkinan tidak terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
27	Masing-masing pihak merasa berada pada posisi yang benar	12	Tinggi	1	Mediator mengurai duduk persoalan yang menjadi sebab sengketa dan menjelaskan aspek-aspek hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang sedang dialami kedua belah pihak	Tidak	51 s/d 90	4	Kemungkinan Besar terjadi	1	Sangat Rendah	4	Rendah	3 s/d 4	Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
	Masing-masing pihak tidak sepakat dengan opsi/solusi yang ditawarkan oleh Mediator	9	Moderat	1	Mediator menawarkan opsi win-win solution dan menjelaskan tentang akibat-akibat yang mungkin terjadi dan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima kedua belah pihak jika tidak bersedia untuk menerima opsi-opsi yang ditawarkan dan tidak sepakat berdamai	Tidak	51 s/d 90	4	Kemungkinan Besar terjadi	1	Sangat Rendah	4	Rendah	3 s/d 4	Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
28	Relaas Upaya Hukum Banding belum diterima sampai batas waktu pengajuan berkas Banding	3	Rendah	1	Koordinator Delegasi menghubungi PN yang dituju untuk memastikan Relas bisa diterima tepat waktu	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
	Pemohon tidak melengkapi memori pada saat pengajuan permohonan PK	3	Rendah	1	Memberikan daftar kelengkapan berkas kepada Pemohon sebelum mendaftarkan Permohonan PK	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4			5	6			7		8		9		10	
29	Masyarakat tidak melengkapi persyaratan Surat Keterangan Miskin	3	Rendah	1	Petugas PTSP memberikan daftar kelengkapan berkas kepada Pemohon sebelum mendaftarkan Permohonan Perkara Prodeo	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
	Hampir tidak pernah ada yang mengajukan Perkara Prodeo	4	Rendah	1	Menghapus kegiatan dan Alokasi Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo dalam RKAKL	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
30	Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan tidak mudah	9	Moderat	1	Panitera Muda Pidana melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan persidangan di luar Gedung Pengadilan bisa dilaksanakan sesuai rencana	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
	Mobilisasi petugas dan alat-alat penunjang persidangan, serta penyiapan tempat sidang di luar gedung pengadilan memerlukan waktu dan biaya	5	Moderat	1	Subbagian PTIP mengalokasikan anggaran untuk mengakomodasi kegiatan persidangan di luar gedung Pengadilan pada saat penyusunan anggaran	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
			NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10			
31	Keterlambatan dalam menunjuk Pihak Penyedia Jasa Bantuan Hukum	10	Tinggi	1	KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan memastikan bahwa Proses Pengadaan Jasa Layanan Posbakum sudah bisa dimulai sejak diterimanya DIPA	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
	Waktu pelayanan Bantuan Hukum kurang memadai	5	Moderat	1	Subbagian PTIP mengupayakan penambahan alokasi anggaran Posbakum pada saat penyusunan anggaran	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
32	Gangguan dan ancaman keamanan terhadap Pelaksana Eksekusi	15	Ekstrim/ Sangat Tinggi	1	KPN atau Panitera atau Panitera Muda Perdata atau Juru Sita melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan eksekusi dilaksanakan pada waktu yang tepat (sesuai dengan kondisi sosial dan isu keamanan) dan didukung oleh jumlah personel pengamanan yang memadai	Efektif	31 s/d 50	3	Mungkin terjadi	1	Sangat Rendah	3	Rendah	3 s/d 4	Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah

REF. KEGIATAN	URAIAN RISIKO	STATUS RISIKO BAWAHAN	PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN				DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS SISA RISIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		NILAI	KATEGORI	NOMOR	URAIAN	EFEKTIF/ TIDAK	%	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4		5	6			7		8		9		10		
	Obyek sengketa yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan	15	Ekstrim/ Sangat Tinggi	1	Melaksanakan Pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa	Efektif	11 s/d 30	2	Kemungkinan kecil terjadi	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah	1 s/d 2	Sangat Rendah
				2	Melakukan Sita Eksekusi	Efektif											

Cara Pengisian kolom :

1. Diisi dengan nomor kegiatan, sama dengan penomoran pada Form-2
2. Diisi dengan Mencopy uraian kegiatan pada Form-1 atau Form-2
3. Diisi dengan Mengcopy dari kolom 5 Form -2
4. Diisi dengan menguraikan upaya/langkah yang telah dilakukan sebagai pengendalian terhadap risiko yang dimaksud. Uraian Pengendalian ini semakin detail semakin baik
5. Diisi dengan penilaian Subyektif kita terhadap upaya pengendalian dimaksud, ditulis Efektif atau tidak efektif, berdasarkan pengalaman pengendalian selama ini.  
Di katakan efektif jika status residual Risk telah sama atau lebih rendah dari Risk Tolerance, dan dikatakan Tidak efektif jika sebaliknya
6. Diisi dengan probabilitas risiko dimaksud, setelah dilakukan pengendalian selama ini. Nilai diberikan secara subyektif, logikanya nilai tersebut dibawah nilai dampak pada Form-2, namun bisa juga sama. Pengendalian risiko yang telah kita nilai efektif tentu saja probabilitasnya turun atau bahkan bisa sangat jarang
7. Diisi dengan dampak yang masih mungkin distimbulkan oleh risiko dimaksud, setelah adanya pengendalian. Nilai diberikan secara subyektif, logikannya nilai tersebut dibawah nilai dampak pada Form-2, namun bisa juga sama. Pengendalian risiko yang telah kita nilai efektif tentu saja dampaknya turun, atau bahkan bisa tidak signifikan
8. Diisi dengan hasil perkalian nilai pada kolom 6 dengan kolom 7 (probabilitas X dampak). Untuk risiko yang telah berhasil efektif dikendalikan, maka status residual risk-nya tentu saja turun dan sama dengn nilai pada kolom 9 berikutnya
9. Risk Tolerance atau toleransi risiko adalah nilai nilai risiko yang bisa diterima oleh pimpinan, sesuai dengan risk appetite (selera risiko) pimpinan. Jadi kolom ini adalah konsumsi pimpinan Pemilik risiko (Risk Owner) mengisi kolom ini dengan memperhatikan segala risiko atau petunjuk pimpinan. Pimpinan dengan selera Risk Taker (Pengambil risiko), biasanya menetapkan nilai risiko yang tinggi. Sedangkan Pimpinan dengan selera Risk Avolder (Cenderung Hati-hati), biasanya menginginkan tingkatan risiko yang lebih rendah lagi
10. Diisi dengan target tingkatan risiko yang ditetapkan oleh Pimpinan. Nilai pada kolom ini bisa sama dengan nilai pada kolom 9, atau bisa juga dibawahnya

**LAMPIRAN IV**  
**FORMULIR PEMETAAN SPIP**  
**PENGADILAN NEGERI ARGAS MAKMUR KELAS II**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Form - 4

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**  
**Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum**  
**Pengadilan Tinggi Bengkulu**  
**Pengadilan Negeri Argas Makmur Kelas II**

- VISI** : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ARGAS MAKMUR YANG AGUNG
- MISI** :
  1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Argas Makmur
  2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Argas Makmur
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Argas Makmur
- TUJUAN** :
  1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- SASARAN** :
  1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
  2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
  4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

*Laporan Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Argas Makmur*

Tahapan Proses Manajemen		Proses pelaksanaan kegiatan					
Tujuan Pengendalian		Service Control					
No	Potensi Risiko Dalam Proses	Pengendalian Yang Ada		Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab Masih adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko
				Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP		
1	2	3		4		5	6
1	Pelaksana yang masih baru/ belum berpengalaman	1	Menyediakan SOP dan Instruksi Kerja	Lingkungan Pengendalian	Komitmen terhadap Kompetensi	Tutorial dan simulasi Aplikasi SIPP dan E-Court untuk petugas baru	Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana
2	Peralatan (Hardware/Software) mengalami kerusakan/gangguan	1	Melakukan Penggantian suku cadang / Upgrade	Lingkungan Pengendalian	Kepimpinan yang Kondusif	Menyiapkan data dukung untuk pengajuan penambahan daya listrik dan Rencana Kebutuhan BMN	Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana
		2	Mengajukan usul pengadaan Alat Pengolah data				
		3	Mengajukan penambahan Daya Listrik				
		4	Melakukan Update Aplikasi versi terbaru				
		5	Mengalokasikan belanja Antivirus dan memasang Antivirus				
3	Masa Penahanan yang hampir habis	1	Mengajukan perpanjangan penahanan kepada KPN atau KPT	Kegiatan Pengendalian	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	Membuat papan kontrol Penahanan dan mengisinya dengan tertib untuk sarana pemantauan	Panitera Muda Pidana
4	Gangguan Keamanan	1	Melaksanakan pengamanan sidang bekerja sama dengan Polres Bengkulu Utara sesuai dengan alokasi anggaran dana kegiatan dalam RKAKL	Lingkungan Pengendalian	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Melaksanakan simulasi penanganan huru-hara secara berkala	Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana



Tahapan Proses Manajemen		Proses pelaksanaan kegiatan					
Tujuan Pengendalian		Service Control					
No	Potensi Risiko Dalam Proses	Pengendalian Yang Ada		Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab Masih adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko
				Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP		
1	2	3		4		5	6
		2	Menata jalur evakuasi Huru-hara	Penilaian Risiko	Identifikasi Risiko		
		3	Melaksanakan Simulasi Penanganan Huru-hara				
5	Pengguna Pengadilan kecewa terhadap Pelayanan Pengadilan	1	Melaksanakan pemantauan proses untuk memastikan SOP berjalan sebagaimana mestinya	Pemantauan	Pemantauan berkelanjutan	Melakukan Inovasi-Inovasi pelayanan	Ketua Pengadilan
		2	Melakukan Revisi SOP jika ada perubahan dasar hukum atau proses serta menyusun Instruksi kerja jika ada Aplikasi yang baru				
		3	Melaksanakan pelatihan Frontliner kepada Petugas PTSP	Informasi dan Komunikasi	Komunikasi		
		4	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat				
		5	Melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi				
6	Menurunnya daya Gedung Kantor, serta Sarana dan Prasarana kantor mengalami kerusakan/gangguan	1	Mengajukan Renovasi Gedung Kantor Pengadilan	Kegiatan Pengendalian	Pengendalian Fisik atas Aset	Mempersiapkan data Dukung untuk pengajuan Renovasi Gedung Kantor	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Tahapan Proses Manajemen		Proses pelaksanaan kegiatan					
Tujuan Pengendalian		Service Control					
No	Potensi Risiko Dalam Proses	Pengendalian Yang Ada		Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab Masih adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko
				Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP		
1	2	3		4		5	6
		2	Menyediakan APAR serta melaksanakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kegiatan Pengendalian	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian		
		3	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara berkala maupun insidental	Lingkungan Pengendalian	Kepimpinan yang Kondusif		
		4	Menganggarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan melakukan revisi anggaran jika kurang				
		5	Mengajukan penambahan Daya Listrik				
7	Pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik	1	Mendata dan memperbaharui dasar hukum-dasar hukum yang dipakai	Lingkungan Pengendalian	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Membuka lebih banyak saluran pengaduan dan menginformasikan kepada masyarakat	Panitera Muda Hukum
		2	Pimpinan Mensosialisasikan dan Menerapkan PERMA Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016	Informasi dan Komunikasi	Komunikasi		
		3	Seluruh Aparatur Pengadilan membuat dan menandatangani Pakta Integritas				

Tahapan Proses Manajemen		Proses pelaksanaan kegiatan					
Tujuan Pengendalian		Service Control					
No	Potensi Risiko Dalam Proses	Pengendalian Yang Ada		Unsur dan Sub Unsur SPIP Penyebab Masih adanya Sisa Risiko		Infrastruktur Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Risiko
				Unsur SPIP	Sub Unsur SPIP		
1	2	3		4		5	6
8	Pemberitaan Negatif yang menyudutkan Pengadilan	1	Humas atau Juru Bicara melakukan Klarifikasi ke Media Massa	Informasi dan Komunikasi	Komunikasi	Membuka lebih banyak saluran Informasi dan menginformasikan kepada masyarakat	Panitera Muda Hukum
9	Kekurangan biaya untuk menyampaikan Putusan	1	Subbagian PTIP mengajukan revisi untuk menambah anggaran pengiriman isi putusan atas usulan PPK kepada KPA	Lingkungan Pengendalian	Kepimpinan yang Kondusif	Melakukan Proyeksi terhadap sisa biaya pada Semester I atau Triwulan III sebagai dasar melakukan Revisi Anggaran	Panitera Muda Pidana
10	Masing-masing pihak tidak sepakat dengan opsi/solusi yang ditawarkan oleh Mediator	1	Mediator menawarkan opsi win-win solution dan menjelaskan tentang akibat-akibat yang mungkin terjadi dan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima kedua belah pihak jika tidak bersedia untuk menerima opsi-opsi yang ditawarkan dan tidak sepakat berdamai	Lingkungan Pengendalian	Komitmen terhadap Kompetensi	Memberikan informasi layanan masyarakat mengenai Mediasi dan manfaat penyelesaian perkara secara damai	Panitera Muda Perdata

Tabel Analisis Sisa Risiko :

MATRIKS ANALISIS RISIKO 5 X 5			DAMPAK				
DESKRIPSI	KEMUNGKINAN	SKALA KEMUNGKINAN	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
			1	2	3	4	5
HAMPIR PASTI TERJADI	91%-99%	5					
KEMUNGKINAN BESAR TERJADI	51%-90%	4				Risiko 3	
MUNGKIN TERJADI	31%-50%	3			Risiko 5, 6, 7, 8		Risiko 9, 10
KEMUNGKINAN KECIL TERJADI	11%-30%	2			Risiko 4		
KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI	1%-10%	1					Risiko 1, 2

Tabel Analisis Sisa Risiko

DESKRIPSI	LEVEL	NOMOR RISIKO
EKSTRIM/SANGAT TINGGI	5	-
TINGGI	4	3, 9, 10
MODERAT	3	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
SEDANG	2	-
RENDAH	1	-



**<http://pn-argamakmur.go.id/>**  
**Email: [pnarma@ymail.com](mailto:pnarma@ymail.com)**  
**Jalan Jenderal Sudirman No. 226**  
**Arga Makmur – Bengkulu Utara**  
**38611**  
**Telepon/ Fax. (0737) 521004, 521014**